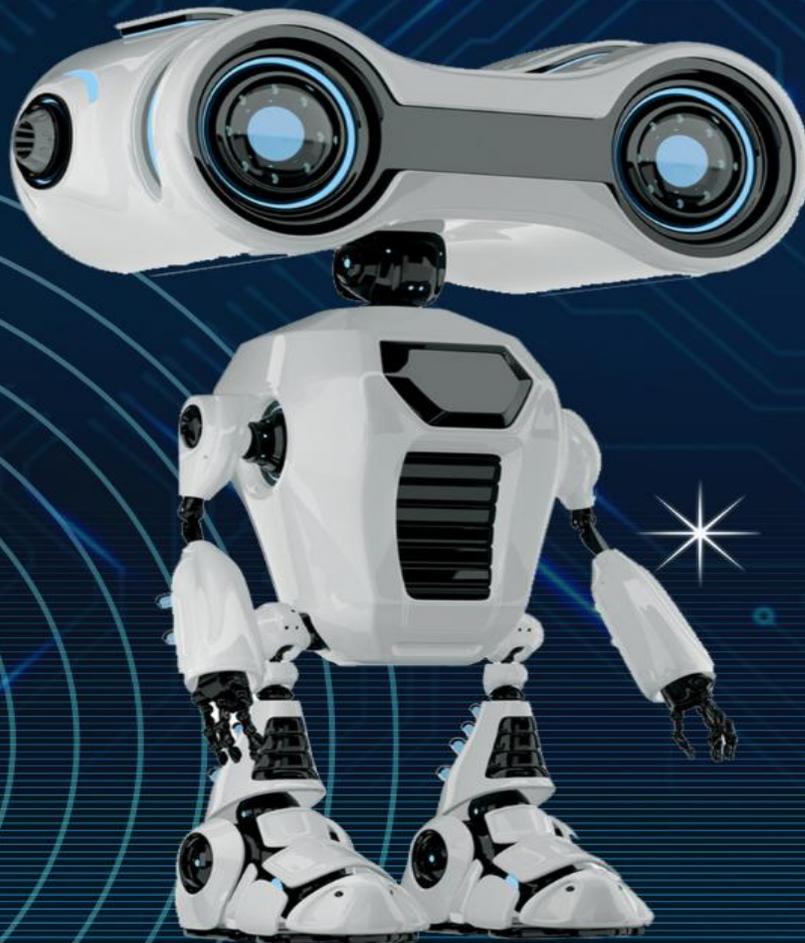




**PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP  
KUALITAS PENCATATAN DAN PELAPORAN  
ASET PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
LITERASI DIGITAL SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI  
PADA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN AGAM**



05098808

**FARIZ ANSHAR FITRAWAN**

# **Dampak Digitalisasi pada Pencatatan dan Laporan Barang Milik Daerah sebagai Variabel Moderasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam**

**Fariz Anshar Fitrawan<sup>1\*</sup>, Rafika Uksi<sup>2\*</sup>**

<sup>1\*</sup>Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia

Email penulis : [fariz130333@gmail.com](mailto:fariz130333@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rafika\\_uksi@poliupg.ac.id](mailto:rafika_uksi@poliupg.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak.** Target utama dari penelitian ini meliputi sejauh mana literasi digital dari aparatur sipil negara berperan dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah dimulai dari ketepatan pencatatan, melakukan auditing barang milik daerah, pelaporan barang milik daerah melalui digitalisasi yang dapat memberantas isu-isu umum berupa kesalahan pencatatan, *human error*, penyalahgunaan barang milik daerah, duplikasi data dan kekeliruan pengguna barang milik daerah dalam membuat laporan secara berkala. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Studi ini melibatkan 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disiapkan menggunakan Google Form. Rekapitulasi data selanjutnya dianalisis dengan statistik deskriptif, mencakup perhitungan *mean*, persentase, dan distribusi frekuensi. Studi ini merangkum beberapa hambatan utama. Hambatan tersebut meliputi: ketergantungan pada jaringan internet, kebutuhan akan perangkat komputer yang memadai, dan perbedaan kompetensi digital antar-ASN dalam pengelolaan BMD. Secara garis besar, penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara digitalisasi dan kompetensi ASN merupakan faktor kunci dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan BMD.

Kata kunci : Digitalisasi, Barang milik daerah,

## **LATAR BELAKANG**

Dalam perkembangan teknologi dan dinamika transformasi birokrasi, Pemerintah Daerah dituntut agar seluruh alur proses bisnis menjadi efektif, efisien, dan akuntabel. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tujuan krusial. Parameter keberhasilan tata kelola dapat diukur melalui optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah.

Barang milik daerah merupakan salah satu sumber daya kunci bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai visi dan misi. Pemanfaatan BMD yang tepat sasaran akan menghasilkan nilai manfaat yang lebih optimal. Oleh karena itu, peran BMD sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dari aspek akuntabilitas.

Pengelolaan BMD sendiri merupakan inti dari proses bisnis Pemerintah Daerah. Proses ini dituntut harus efektif, efisien, dan akuntabel.

Namun, saat ini Pemerintah Daerah—khususnya Kabupaten Agam—masih banyak menggunakan pencatatan secara konvensional. Pendekatan ini memiliki banyak kelemahan. Sistem konvensional sangat bergantung pada penggunaan kertas, alat tulis kantor, penggandaan berkas dalam skala besar, serta membutuhkan banyak SDM. Akibatnya, proses bisnis yang berjalan cukup menghabiskan waktu.

Dimana keunggulan dari digitalisasi pengelolaan barang milik daerah antara lain :

1. Ketepatan pencatatan barang milik daerah
2. Proses bisnis yang lebih otomatis
3. Kemudahan dalam melakukan pemeriksaan
4. Transparansi dan akuntabel

## **GAP ANALYSIS DAN NOVELTY**

Pengelolaan barang milik daerah pada saat ini masih dilakukan secara konvensional dimana penggunaan kertas, penggandaan berkas laporan, kebutuhan akan beberapa sumber daya manusia dalam pengelolaan barang milik daerah , hingga durasi proses pengelolaan masih dikatakan tergolong lambat. Apabila dibiarkan akan berdampak seperti :

1. Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak optimal, dikarenakan pemanfaatan barang milik daerah yang tidak teridentifikasi dengan peruntukannya
2. Anggaran pada APBD menjadi boros, salah satu penyebabnya adalah duplikasi data barang milik daerah yang membuat anggaran pemeliharaan barang milik daerah meningkat
3. Resiko penyalahgunaan dan kehilangan barang milik daerah meningkat karena pembaharuan data barang milik daerah yang tidak tepat
4. Tidak tercapainya visi misi Pemerintah Daerah dalam tata Kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan barang milik daerah

Tujuan utama dalam penelitian ini bermuara pada capaian visi misi Pemerintah Daerah yaitu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan barang milik daerah. Tujuan ini dibagi atas dua capaian meliputi tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka Panjang.

Adapun tujuan jangka pendek dari penelitian ini berupa mengetahui sejauh mana kompetensi akan literasi aparatur sipil negara dalam pengelolaan visi misi Pemerintah Daerah dalam tata Kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam , bagaimana adaptasi digital dapat berperan dalam pengelolaan visi misi Pemerintah Daerah dalam tata Kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam.

Tujuan jangka panjang penelitian ini mencakup dua hal yaitu, melihat dampak digitalisasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap optimalisasi sumber daya yang ada. Dan menjadi dasar tindak lanjut pengembangan digitalisasi pengelolaan BMD secara menyeluruh pada semua Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Agam.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis. Tujuannya adalah menyajikan gambaran mengenai kondisi aktual pengelolaan Barang Milik Daerah. Strategi survei memudahkan peneliti mengungkap situasi di lapangan dari berbagai aspek dan sudut pandang.

Populasi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Agam yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebanyak 50 responden dilibatkan. Jumlah ini diharapkan menghasilkan data yang relevan dengan kondisi faktual di BKAD Kabupaten Agam.

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

Kuesioner dibuat untuk mengukur tiga aspek yaitu : Adopsi digitalisasi pengelolaan barang milik daerah. Literasi aparatur sipil negara terkait . Kualitas dalam pelaporan BMD. Analisis penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, mengukur tingkat pemanfaatan digitalisasi BMD dalam pengelolaan aset; kedua, menilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam literasi digital. Hasil temuan ini selanjutnya akan diinterpretasikan, lalu dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. Perbandingan tersebut berfungsi untuk memperkuat analisis mengenai efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berbasis digital.

Gambar 1. Tangkapan layar *Google Form* pengumpulan data *response*

The image shows a screenshot of a Google Form with three Likert scale questions. Each question has five radio button options labeled 1 to 5, with 'Sangat rendah' on the left and 'Sangat tinggi' on the right. The questions are:

1. Tingkat adopsi digitalisasi sistem pencatatan aset \*
2. Literasi digital aparatur \*
3. Kualitas pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah \*

At the bottom of the form, there is a purple 'Kirim' button and a note: 'Jangan mengirimkan sandi melalui Google Formulir'.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan digitalisasi pada Barang Milik Daerah (BMD) secara umum menunjukkan kategori Tinggi, dengan nilai rata-rata (mean) 4,21. Mayoritas responden mencatat dampak positif signifikan, terutama berupa minimalisasi kesalahan pencatatan dan efisiensi proses penginputan data. Kemudahan pelacakan BMD menjadi indikator kunci keberhasilan. Indikator pendukung lainnya, seperti kemudahan penggunaan, kecepatan akses, dan otomatisasi masing-masing memiliki nilai rata-rata 4,00.

Kualitas pelaporan BMD juga menunjukkan peningkatan relatif tinggi, mencapai nilai rata-rata tertinggi (mean = 4,25). Peningkatan ini terlihat jelas pada aspek ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan dokumen. Digitalisasi mempermudah verifikasi dan secara efektif meminimalisir risiko duplikasi data aset.

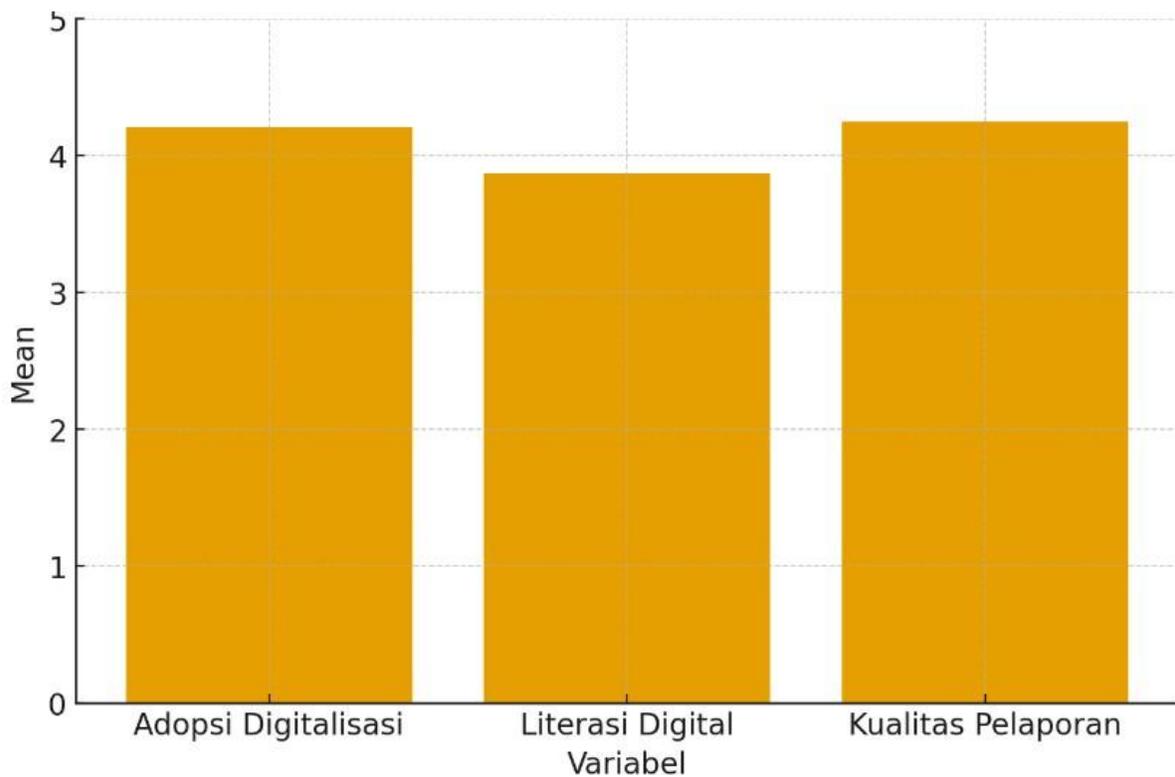
Variabel	Mean	Kategori
Digitalisasi	4,21	Tinggi
Literasi Digital pegawai	3,87	Cukup Tinggi
Kualitas Pelaporan	4,25	Tinggi

Literasi digital pegawai berada pada kategori Cukup Tinggi (mean = 3,87). Kategori ini mencakup Aparatur Sipil Negarayang mampu menggunakan fitur-fitur sistem secara optimal. Meskipun demikian, 18% ASN dinyatakan memiliki literasi rendah. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan kompetensi literasi digital di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Agam.

Selain ketidakmerataan kompetensi digital pegawai, penelitian mengidentifikasi beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan jaringan internet dan perangkat komputer yang kurang memadai.

Dari perspektif sektor publik, transformasi digital merupakan instrumen utama dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Digitalisasi diharapkan mampu mengurangi kesalahan, mengintegrasikan data, dan membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, digitalisasi di BKAD Kabupaten Agam berdampak positif terhadap pengelolaan BMD.

Gambar 1. Grafik pengumpulan data *Google Form*



## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan kontribusi signifikan. Hal ini terlihat dari cepatnya proses pencatatan dan penyusunan laporan, serta minimalnya kesalahan input data. Secara tidak langsung, kondisi ini mendorong peningkatan akurasi data, mempermudah audit, dan memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola BMD. Peran utama pegawai yang kompeten dengan literasi digital tinggi adalah mampu memanfaatkan fitur-fitur sistem dengan optimal. Mereka juga lebih memahami alur pengoperasian dan lebih adaptif terhadap perkembangan sistem. Adopsi digitalisasi secara umum dikategorikan Tinggi, dengan nilai rata-rata (mean) 4,21. Angka ini menunjukkan bahwa pegawai menilai digitalisasi memberikan manfaat nyata, terutama dalam aspek kemudahan. Sebanyak 82% responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju terhadap manfaat digitalisasi. Nilai rata-rata literasi digital pegawai adalah 3,87, yang dikategorikan cukup tinggi. Namun, data menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi sebesar 18% di antara responden. 52% responden berada pada kategori sedang. 30% responden berada pada kategori tinggi. Ketimpangan literasi ini berdampak pada kelangsungan pengoperasian sistem, terutama dalam penggunaan fitur kompleks seperti pembuatan laporan otomatisasi.

Variabel Kualitas Pelaporan memperoleh nilai 4,25, menjadikannya skor tertinggi dari ketiga variabel. Angka ini menunjukkan kualitas pelaporan BMD juga berada pada kategori Tinggi.

Dimensi	Mean
Ketepatan Waktu	4,32
Akurasi Data	4,27
Kelengkapan Dokumen	4,18
Kemudahan Verifikasi	4,24

Hasil dari penelitian ini menyajikan bahwa pengelolaan melalui digitalisasi dapat meningkatkan ketepatan pelaporan barang milik daerah dan mempermudah proses bisnis terutama dalam melakukan pemeriksaan.

Kendala utama terlihat pada sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Beberapa kendala meliputi :

<b>Kendala</b>	<b>Persentase <i>respondense</i></b>
Kestabilan jaringan internet	46 %
Spek Perangkat perngoperasian rendah	38%
Kesulitan <i>user</i> pada beberap fitur	34%
Minimnya update sistem	22%

## **SARAN**

Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan penguatan sumber daya manusia terutama dalam pengoperasian sistem melalui bimbingan teknis dan tidak hanya berfokus pada infrastruktur digitalisasi saja. Pelatihan seperti Bimtek juga dilakukan secara bertahap dan berkala serta disesuaikan dengan budaya kerja dalam adaptasi perkembangan teknologi .

Begitupun nantinya evaluasi berkala dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan kinerja sistem dan sumber daya manusia dapat sejalan dengan sinergi. Dan yang terakhir, diperlukan dukungan regulasi agar digitalisasi ini dapat berjalan secara menyeluruh dan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, B. (2022). Penerapan SIMDA BMD dalam pengelolaan aset daerah . *Jurnal Administrasi dan Akuntansi Publik*, 7(2), 88-101.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Selemba Empat
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Khan, A., & Rahman, M. (2021). Digital asset management in developing countries: Human resource capacity challenges. *International Public Sector Review*, 9(1), 55-70.
- Mahmudi. (2020). *Akuntansi pemerintahan daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muller, J., Schmidt, L., & Weber, T. (2022). Cloud-based information systems for public asset management: Efficiency implications. *Jurnal of Digital Governance*, 14(3), 112-130.
- Nurhayati, S., & Pratama, A. (2021). The impact of digital transformation on public sector asset management: Evidence from local governments in Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 12(2), 45-58.
- Osei-Bonsu, K. (2024). Digital literacy and data reliability in public sector asset reporting. *International Journal of Public Administration*. 33(2), 99-118.
- Prasetyo, D., & Utami, R. (2023). Digital government implementation and human resource readiness in local public administration. *Public Sector Innovation Journal*, 11(1), 55-70.
- Putri, A., & Setiawan, R. (2023). Digital asset management systems in local government: Improving accuracy and transparency. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 9(1), 35-48.
- Ramadhani, L., (2023). Evaluasi kualitas pelaporan Barang Milik Daerah di era digital. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Daerah*, 8(2), 66-80.
- Sugiyono, (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T. (2024). Digital literacy of civil servants in supporting asset management systems. *International Journal of Public Accounting*, 15(3), 102-117.
- Widodo, T. (2022). Digital literacy and performance of local civil servants using e-government systems. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 120-134.
- Wibowo, H., & Nugraha, D. (2022). Digital literacy and technology acceptance among civil servant: Implications for the effectiveness of government information system. *Jurnal administrasi Pemerintahan*, 10(1), 77-90.
- Zhang, H., & Li, X. (2023). Artificial intelligence integration in public asset recording Systems: Accuracy and automation. *Jurnal of Government Information Systems*, 18(1), 44-59.